

## **Debat Publik PSU Pilkada Kukar Adu Program Pembangunan dan Pengelolaan Anggaran**



*Sumber gambar: Kaltim Post      Kamis, 10/04/2025*

**DI** balik gelimang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) yang mencapai Rp14,7 triliun, terbentang realitas ironis. Jalan rusak yang menganga di berbagai pelosok, akses digital yang masih jadi impian bagi sebagian warga, dan potensi sumber daya alam melimpah yang belum sepenuhnya meneteskan kesejahteraan merata.

Kondisi inilah yang menjadi arena pertarungan gagasan sengit dalam Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2024 tadi malam (9/4) di Tenggarong Seberang. Tiga pasang kandidat, Aulia Rahman Basri-Rendi Solihin (Paslon 01), Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (Paslon 02), dan Dendi Suryadi-Alif Turiadi (Paslon 03), beradu visi menjawab tantangan fundamental Kukar sebagai kabupaten terluas di Kalimantan Timur.

Isu transformasi digital menjadi medan perdebatan awal. Paslon 01, Aulia-Rendi, menekankan pentingnya digitalisasi *hybrid* yang bernilai efisiensi dan akuntabilitas, didukung *helpdesk* kecamatan dan program internet gratis desa sebagai fondasi. “Digitalisasi harus mendekatkan layanan, bukan sebaliknya,” tegas Aulia. Mereka menjanjikan sistem pelayanan publik *hybrid* di 20 kecamatan dan integrasi data kependudukan di Mal Pelayanan Publik.

Sementara itu, Paslon 02, Awang Yacoub Luthman (AYL)-Akhmad Zais (AZA), menawarkan akselerasi melalui “e-Government Kukar 5.0” berbasis AI yang ditargetkan rampung dalam enam bulan untuk mengatasi tantangan geografis dan demografi Kukar. “Tak perlu lagi proses panjang, semua bisa diselesaikan dengan teknologi,” ujar AYL. Beda lagi Paslon 03, Dendi-Alif, yang memandang digitalisasi sebagai keharusan, namun menggarisbawahi prasyarat mutlak: ketersediaan listrik merata. “Digitalisasi hanya bisa berjalan jika penunjang utama tersedia,” kata Dendi. Alif Turiadi menambahkan janji konkret pembangunan Wi-Fi di seluruh RT dan aplikasi terintegrasi “SAKTI”. Namun, Alif juga mengkritik Paslon 1 yang dinilainya kurang konkret.

Perdebatan memanas saat memasuki topik infrastruktur, khususnya kondisi jalan yang menjadi sorotan Paslon 03. Alif Turiadi mengutip data Dinas PUPR yang menyatakan kerusakan jalan justru memburuk hingga puncaknya pada 2024, meski APBD tinggi. “Jika terpilih, kami utamakan jalan interkoneksi dan jalan usaha tani,” janjinya, seraya

menyinggung dugaan kurangnya transparansi dan potensi “kongkalikong” menambahkan, jalan berkualitas akan memacu sektor ekonomi lainnya.

Menanggapi hal ini, Rendi Solihin memaparkan tantangan anggaran. “Butuh lebih dari Rp40 triliun agar jalan Kukar mulus semua,” ungkapnya, sembari menegaskan bahwa pihaknya sudah memulai perbaikan di beberapa titik. Seperti Berimbin dan Anggana. Lanjut dia, pemerintah juga tengah membangun dua jembatan strategis. Yakni Muara Wis-Muara Muntai dan Sangasanga-Anggana.

Paslon 02, melalui Akhmad Zais, menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama. “Apa gunanya kita kaya kalau hasil pertanian susah disalurkan? Infrastruktur harus jadi perhatian utama,” tegasnya.

### **HARMONI SOSIAL, KESETARAAN GENDER, DAN PENGELOLAAN APBD**

Ketiga paslon sepakat tentang pentingnya menjaga kerukunan di Kukar yang majemuk. Paslon 01 mengklaim keberhasilan melalui forum-forum kerukunan (FKUB, FPK, FKDM), dan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, serta menaikkan dana gotong royong RT menjadi Rp150 juta. Paslon 02 menawarkan program “Bhinneka Tunggal Suaka,” sementara Paslon 03 mengusung konsep “Gerbang Nusantara” dan menekankan keadilan sebagai kunci ketenteraman.

Isu kesetaraan gender juga dibahas. Semua paslon berkomitmen memberdayakan perempuan. Rendi Solihin menunjuk tren positif indeks ketimpangan gender Kukar dan program pemberdayaan UMKM serta disabilitas yang sudah berjalan. Sedangkan Awang Yacoub menjanjikan program ekspor yang melibatkan perempuan. Sementara Paslon 03, menekankan pelatihan khusus dan peran utama perempuan. Akhmad Zais mengingatkan bahwa Perda Kesetaraan Gender sudah ada dan banyak perempuan memegang jabatan penting.

Persoalan pengelolaan APBD dan sumber daya alam kembali memicu perdebatan. Paslon 01 fokus pada hilirisasi, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marangkayu, dan optimalisasi potensi pengapalan. Sedangkan Paslon 02 ingin mengambil alih *Participating Interest* (PI) Blok Migas dan mendorong pembangunan pabrik CPO rakyat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). Paslon 03 menyoroti dugaan kebocoran anggaran dan KKN yang membuat APBD besar belum optimal dirasakan rakyat. Terjadi saling sindir antara Rendi Solihin dengan Akhmad Zais dan Alif Turiadi mengenai pemahaman penghitungan DBH, meskipun keduanya adalah mantan anggota DPRD.

### **SERANGAN PERSONAL DAN ISU KEBERLANJUTAN PROGRAM**

Debat tak luput dari serangan personal dan klarifikasi. Isu keabsahan ijazah dan gelar non-akademik Rendi Solihin diangkat oleh Akhmad Zais, yang kemudian diklarifikasi oleh Rendi sebagai *hoaks* yang sudah diverifikasi berulang kali. Pertanyaan Rendi mengenai pilihan Alif Turiadi dan Dendi Suryadi yang tinggal di Samarinda juga memicu respons keras, dianggap tendensius, meskipun Akhmad Zais mencoba menjadikannya usulan kebijakan (Perda Kewajiban Domisili Bagi Pejabat).

Isu keberlanjutan program juga mencuat. Aulia Rahman Basri mempertanyakan pandangan AYL tentang kesinambungan program, mengingat rekam jejak AYL di masa lalu sebagai mantan Ketua DPRD dan Direktur PDAM. AYL menjawab bahwa keberlanjutan harus disertai perbaikan dan hasil nyata, tidak hanya bergantung APBD. Sementara Dendi Suryadi mencontohkan Pulau Kumala yang dianggapnya terbengkalai sebagai bukti program tidak berlanjut, yang dibantah Aulia dengan klaim adanya progres. AYL kemudian menyinggung penurunan akreditasi RSUD Kota Bangun yang pernah dipimpin Aulia sebagai direktur. Aulia membela dengan menjelaskan kondisi awal RS yang mangkrak.

Debat publik ini tak sekadar adu retorika, tetapi membuka tirai kontras visi untuk masa depan Kutai Kartanegara. Di satu sisi, terhampar janji lompatan digital, infrastruktur masif, dan optimalisasi kekayaan alam. Di sisi lain, membayangi pertanyaan krusial tentang fundamental yang belum tuntas: jalan layak, listrik merata, transparansi anggaran, dan keberlanjutan program yang kerap terputus di tengah jalan. Sengitnya adu argumen, saling sanggah, hingga sentilan personal menunjukkan tingginya pertarungan keabsahan.

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Debat Publik PSU Pilkada Kukar Adu Program Pembangunan dan Pengelolaan Anggaran, 10/04/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Debat Publik PSU Pilkada Kukar: Keberlanjutan Program dan Ketergantungan APBD, 09/04/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
  - (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
  - (2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
  - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:
    - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. kepentingan umum;
    - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
    - d. RPJMD.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Perda Kabupaten Kukar 6/2021), pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3. Dalam Pasal 9 Perda Kabupaten Kukar 6/2021 diatur sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
  - (2) Apabila masa jabatan bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa (satu) tahun ke depan dapat mengacu kepada program yang tertuang dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun kebijakan umum APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.